



PROSIDING SENANDIKA

Seminar Nasional Administrasi Publik UNTIRTA

Refleksi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045

TINGKAT KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DI KOTA SERANG

The Success Rate of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Policy Implementation in Serang City

¹Kiki Faisal, ²Hana Khairunisa, ³Yuan Sukses, ⁴Khaila Syasya Nabila,

⁵Dennis Lintang Octavianingrum, ⁶Alifvia Rahma Aprilita, ⁷Dwi Lestari

^{1,2,3,4,5,6,7}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

¹kikifaizal1308@gmail.com, ²hanaeffe@gmail.com, ³yuansukses07@gmail.com,

⁴khaila.syasya@gmail.com, ⁵thisdennisel@gmail.com, ⁶alifviaaprilita@gmail.com,

⁷wilesta.hidayat@gmail.com.

Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan;
Tilang Elektronik.

Keywords:

Policy Implementation;
Electronic Traffic Law
Enforcement.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya masalah dalam implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Serang, yaitu peningkatan jumlah kendaraan di Kota Serang dan hanya terdapat enam titik e-tilang di Kota Serang sehingga penerapannya belum efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan implementasi ETLE di Kota Serang dengan menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan model implementasi kebijakan Grindle. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan SPSS 25.0. Sampel penelitian menggunakan *voluntary sampling* dengan jumlah 100 responden. Hasil penelitian diperoleh bahwa tingkat keberhasilan implementasi kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Serang sebesar 76%, artinya berjalan dengan baik. Agar implementasi dapat lebih baik, perlu penambahan titik kamera e-tilang, peningkatan pengawasan, dan peningkatan sosialisasi secara masif dan konsisten.

Abstract

This research is motivated by the existence of problems in the implementation of *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) in Serang City, namely the increase in the number of vehicles in Serang City and there are only six e-ticket points in Serang City so that the implementation has not been effective. This study aims to determine how much the success rate of ETLE implementation in Serang City using quantitative methods and using the Grindle policy implementation model. Data collection was done through questionnaires, observation, and documentation studies. Data analysis using SPSS 25.0. The research sample used *voluntary sampling* with a total of 100 respondents. The results showed that the success rate of the implementation of the *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) policy in Serang City was 76%, meaning that it went well. In order for the



ISSN :

PROSIDING SENANDIKA

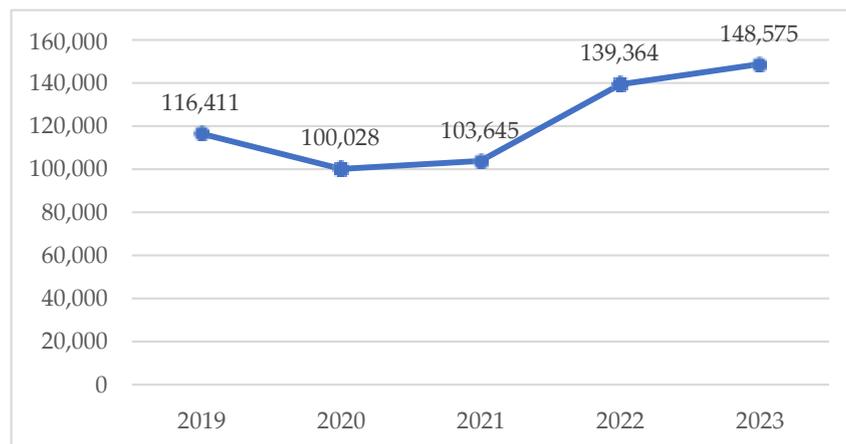
Seminar Nasional Administrasi Publik UNTIRTA

Refleksi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045

implementation to be better, it is necessary to add e-ticket camera points, increase supervision, and increase socialization massively and consistently.

A. PENDAHULUAN

Transportasi memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Transportasi memberikan kemudahan dalam mobilitas manusia dan menjamin konektivitas antar wilayah sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Saat ini, perkembangan transportasi banyak dipengaruhi oleh teknologi. Perkembangan teknologi dalam bidang transportasi berdampak terhadap jumlah kendaraan. Meningkatnya jumlah kendaraan akan mengakibatkan adanya kepadatan lalu lintas dan perlu diatur agar tidak menimbulkan kemacetan dan kecelakaan. Maka, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, dan mewujudkan etika berlalu lintas. Namun, adanya kebijakan tersebut tidak menjamin bahwa setiap warga negara akan patuh dan taat terhadap segala hal tentang berkendara yang telah diatur di dalamnya, salah satunya pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas dapat menimbulkan permasalahan baru yang berakibat lebih fatal, salah satunya dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Berikut jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia dalam lima tahun terakhir:



Grafik 1

Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Tahun 2019-2023

Sumber: Kepolisian RI, dilansir dari goodstats.id, 2024.

Berdasarkan Grafik 1, diketahui terjadi peningkatan signifikan kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia tahun 2021-2023, dimana kasus kecelakaan lalu lintas pada 2023 mencapai 148.575 kasus yang merupakan kasus tertinggi dalam lima tahun terakhir. Dalam upaya menurunkan kasus pelanggaran lalu lintas, Polisi Republik Indonesia (POLRI) menciptakan inovasi *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* atau lebih dikenal dengan e-tilang yang merupakan penggunaan teknologi dalam sistem elektronik dengan menggunakan kamera pengawas atau CCTV untuk mencatat pelanggaran lalu lintas. Kebijakan tilang elektronik diatur dalam Pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009 bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik sebagai alat bukti di pengadilan. Selain untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas, e-tilang juga sebagai bentuk transparansi pada masyarakat dalam penegakkan pelanggaran lalu lintas. Sejauh ini, terdapat 20 daerah yang sudah menerapkan e-tilang, salah satunya adalah Polda Banten (Kota Serang, Tangerang dan sekitarnya).

Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang cukup padat penduduknya. Dilansir dari BPS Provinsi Banten (2024), jumlah penduduk Provinsi Banten pada akhir tahun 2023 adalah 12,47 juta jiwa. Jumlah penduduk yang cukup banyak tentunya berpengaruh dengan tingginya jumlah kendaraan bermotor, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Tahun 2022

| Kabupaten/Kota | Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (unit) | | | | |
|------------------------|--|-------|---------|--------------|-----------|
| | Mobil Penumpang | Bus | Truk | Sepeda Motor | Jumlah |
| Kab Pandeglang | 21.592 | 659 | 8.901 | 196.849 | 228.001 |
| Kab Lebak | 20.926 | 313 | 10.166 | 250.941 | 282.346 |
| Kab Tangerang | 199.489 | 1.623 | 54.044 | 1.199.905 | 1.455.061 |
| Kab Serang | 45.711 | 303 | 13.743 | 394.673 | 454.430 |
| Kota Tangerang | 221.936 | 2.197 | 45.826 | 963.300 | 1.233.259 |
| Kota Cilegon | 37.667 | 606 | 10.411 | 172.058 | 220.742 |
| Kota Serang | 45.182 | 406 | 9.045 | 192.853 | 247.486 |
| Kota Tangerang Selatan | 241.469 | 1.556 | 29.989 | 661.706 | 937.720 |
| Provinsi Banten | 833.962 | 7.640 | 182.125 | 4.032.285 | 5.056.012 |

Sumber: Badan Pusat Statisti (BPS) Provinsi Banten, 2024.

Berdasarkan Tabel 1, jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Banten tahun 2022 cukup tinggi, yaitu mencapai 5.056.012 unit. Jumlah kendaraan terbanyak di Kabupaten Tangerang yang mencapai 1.455.061 unit. Adapun Kota Serang mencapai 246.486 kendaraan pada tahun 2022 dan tidak menutup kemungkinan akan meningkat di tahun 2024 karena Kota Serang menjadi pusat pemerintah di Provinsi Banten dan merupakan jalan perlintasan menuju Pelabuhan Merak sehingga sering dilalui oleh pengendara. Berikut perkembangan jumlah kendaraan di Kota Serang tahun 2022 hingga 2023:

Tabel 2
Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Serang Tahun 2022-2023

| Kecamatan | Tahun | |
|--------------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2023 |
| Curug | 39.432 | 42.954 |
| Walantaka | 30.654 | 19.519 |
| Cipocok Jaya | 38.738 | 21.166 |
| Serang | 113.647 | 114.462 |
| Taktakan | 29.208 | 33.354 |
| Kasemen | 19.083 | 35.737 |
| Kota Serang | 248.135 | 267.192 |

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, 2024.

Berdasarkan Tabel 2, diketahui terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari 248.135 unit di tahun 2022 menjadi 267.192 di tahun 2023. Adapun, jumlah kendaraan terbanyak terdapat di Kecamatan Serang yang merupakan pusat kota mencapai 114.462 unit di tahun 2023.

Sistem tilang elektronik sudah diimplementasikan di Kota Serang sejak 01 April 2021 dibawah Polres Serang Kota. Namun, Pelaksanaan tilang elektronik hingga saat ini masih terbatas jangkauannya, dimana kamera e-tilang baru tersebar pada enam titik di Kota Serang, yaitu: (1) Lampu merah Ciceri, (2) Lampu merah Sumur Pecung, (3) Lampu merah Pisang Mas, (4) Jalan Raya Serang-Jakarta di depan pintu keluar Mall of Serang (MOS), (5) Simpang empat Kebon Jahe, dan (6) Simpang empat Ciruas, tepatnya di depan Polsek Ciruas.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan fokus penelitian. *Pertama*, penelitian oleh Ginanjar Maulana Faturohman & Mirra Noor Tahun (2021) dengan judul "Peran Keadilan Prosedural dan Identitas Sosial Dalam Meningkatkan Efektivitas Penerapan E-Tilang di Jakarta (Analisis Kebijakan)" dengan menggunakan metode analisis kebijakan, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem e-Tilang ini memiliki 3 pertimbangan: (1) Menyelenggarakan peradilan; (2) Lembaga yang mendapatkan amanat untuk menyelenggarakan perkara pelanggaran lalu lintas; dan (3) Dalam penyelesaian dan pengelola terhadap pelanggaran lalu lintas yang belum optimal. *Kedua*, penelitian oleh Muchammad Maulana & Indriastuti (2023) dengan judul "Penerapan Implementasi E-Tilang Di Kota Surabaya (Studi Kejaksaaan Negeri Surabaya)" menggunakan metode kualitatif, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Tilang di Kota Surabaya jika dilihat dari prosedur pembayaran cukup mudah karena secara online melalui aplikasi, namun yang masih menjadi kendala adalah "Human Error" dan "System Error".

Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk meneliti "Tingkat Keberhasilan Implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kota Serang".

B. METODE

Penelitian "Tingkat Keberhasilan Implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kota Serang" menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur seberapa besar tingkat keberhasilan kebijakan ETLE di Kota Serang. Instrumen penelitian berupa kuesioner yang dibuat oleh peneliti menggunakan bantuan skala Likert dengan bobot penilaian: 4 (sangat setuju), 3 (setuju), 2 (tidak setuju), dan 1 (sangat tidak setuju). Adapun kriteria hasil presentasi dari skala Likert, dibuat peneliti sebagai berikut:

Tabel 3
Kriteria Hasil Presentasi

| Hasil Presentasi | Keterangan |
|------------------|-------------|
| 1% - 25% | Tidak Baik |
| 26% - 50% | Kurang Baik |
| 56% - 75% | Baik |
| 76% - 100% | Sangat Baik |

Sumber: Peneliti, 2024.

Teknik pengumpulan data melalui kuesioner, observasi, dan studi dokumentasi. Pengumpulan data melalui kuesioner dilakukan menggunakan bantuan *google form*, sedangkan pengumpulan data melalui observasi dengan melakukan pengamatan di enam titik e-tilang di Kota Serang.

Populasi penelitian, yaitu pengendara di Kota Serang, baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 sebanyak 267.192. Dengan menggunakan rumus Taro Yamane, diperoleh sampel sebanyak 99,95 dibulatkan menjadi 100. Adapun, teknik penarikan sampel menggunakan *non probability sampling* dengan *voluntary sampling*, dimana partisipan secara sukarela berpartisipasi dalam penelitian. Teknik analisis data dilakukan melalui tahap *editing*, *coding*, dan data *entry* menggunakan *microsoft excel* dan SPSS 25.0.

Uji validitas terhadap 30 responden dengan rumus *Pearson Correlation Product Moment* pada SPSS 25.0, memperoleh hasil bahwa 36 item pernyataan pada kuesioner dinyatakan valid karena seluruh nilai r hitung $> r$ tabel (0,361). Adapun hasil perhitungan uji reliabilitas menggunakan rumus *Alpha Cronbach* pada SPSS 25.0 dengan jumlah responden sebanyak 100 orang mendapatkan nilai sebesar 0,966. Maka hasil dari pengujian dinyatakan sangat tinggi atau sangat reliabel karena nilai reliabilitas berada di rentang $0,90 < r < 1,00$ (Creswell, 2014).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mengukur tingkat keberhasilan implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kota Serang digunakan model implementasi kebijakan dari Marile S. Grindle (dalam Agustino, 2008) yang memiliki 2 variabel, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*ontent of implementation*).

1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Hasil pengolahan data dalam penelitian pada indikator *content of policy*, terdapat dua puluh dua pernyataan, dan memperoleh skor ideal sebesar $4 \times 22 \times 100 = 8.800$ (Keterangan: 4 = jumlah skala likert tertinggi, 22 = jumlah pernyataan, 100 = jumlah responden). Adapun hasil dari penelitian pada indikator *content of policy* mendapatkan hasil sebesar $6.608 : 8.800 = 0.7509 \times 100\% = 75\%$. Artinya, implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kota Serang pada indikator *content of policy* sudah berjalan dengan baik berdasarkan kriteria hasil persentase yang ditetapkan.

a. Kepentingan-kepentingan yang Mempengaruhi

Kepentingan yang mempengaruhi suatu kebijakan memiliki peluang untuk melakukan perubahan dalam hubungan sosial, politik, ekonomi pada masyarakat. Hasil pengolahan data dalam penelitian pada sub indikator kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, terdapat tiga pernyataan dan memperoleh skor ideal sebesar $4 \times 3 \times 100 = 1.200$ (Keterangan: 4 = jumlah skala likert tertinggi, 3 = jumlah pernyataan, 100 = jumlah responden). Hasil penelitian sebesar, yaitu $909 : 1.200 = 0.7575 \times 100\% = 75\%$. Artinya, implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kota Serang pada subindikator kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi sudah berjalan dengan baik berdasarkan kriteria hasil persentase yang ditetapkan.

Peneliti ini menyertakan pernyataan terbuka pada kuesioner penelitian yang bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai implementasi kebijakan ETLE di Kota Serang yang dilihat melalui indikator ini. Adapun masyarakat dominan menyatakan bahwa penerapan ETLE di Kota Serang ini sangat penting untuk diterapkan karena dengan dapat meningkatkan ketertiban lalu lintas dengan memberikan sanksi melalui surat ke pelanggar secara langsung, namun, penerapan ETLE baru tersebar dibeberapa titik saja sehingga jika pelaksanaannya ingin efektif, alangkah baiknya disetiap perlintasan lampu merah dipasang kamera e-tilang.

b. Tipe Manfaat

Pembuatan sebuah kebijakan tentu memiliki manfaat yang berdampak positif bagi masyarakat untuk dapat melakukan sebuah perubahan menjadi lebih baik dan juga memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Hasil pengolahan data dalam penelitian pada sub indikator tipe manfaat terdapat empat pernyataan dan memperoleh skor ideal sebesar $4 \times 4 \times 100 = 1.600$ (Keterangan: 4 = jumlah skala likert tertinggi, 4 = jumlah pernyataan, 100 = jumlah responden). Adapun hasil dari penelitian pada sub indikator ini mendapatkan hasil sebesar $1.268 : 1.600 = 0.7925 \times 100\% = 79\%$. Artinya, implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kota Serang pada sub indikator tipe manfaat sudah berjalan dengan sangat baik berdasarkan

kriteria hasil persentase yang ditetapkan.

Peneliti menyertakan pernyataan terbuka yang terlampir pada kuesioner penelitian. Adapun tanggapan masyarakat mengenai implementasi kebijakan ETLE di Kota Serang dilihat melalui sub indikator ini menyatakan bahwa masyarakat banyak menerima manfaat penerapan ETLE, dimana penindakan bisa dilakukan dengan mudah karena dilakukan secara elektronik sehingga dapat mengurangi ketegangan diri secara langsung dengan polisi. Selain itu, penerapan ETLE dirasakan mengurangi kemacetan dibandingkan dengan pada saat tilang manual yang dilakukan oleh polisi, kemudian pada saat melakukan pembayaran pelanggaran juga mudah karena dapat melalui transaksi secara *online* sehingga lebih efisien dan transparan dalam penegakan hukum.

c. Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai

Dasar pembuatan sebuah kebijakan tentunya memiliki derajat perubahan yang ingin dicapai, implementasi yang baik pastinya memberikan hasil yang baik mengenai proses tahap demi tahap untuk melakukan perbaikan agar target untuk melakukan perubahan dapat tercapai. Hasil pengolahan data dalam penelitian pada sub indikator derajat perubahan yang ingin dicapai terdapat empat pernyataan, dan memperoleh skor ideal sebesar $4 \times 4 \times 100 = 1.600$ (Keterangan: 4 = jumlah skala likert tertinggi, 4 = jumlah pernyataan, 100 = jumlah responden). Adapun hasil dari penelitian pada sub indikator ini mendapatkan hasil sebesar $1.280 : 1.600 = 0.8000 \times 100\% = 80\%$. Artinya, implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kota Serang pada sub indikator derajat perubahan yang ingin dicapai sudah berjalan dengan sangat baik berdasarkan kriteria hasil persentase yang ditetapkan.

Peneliti menyertakan pernyataan terbuka yang terlampir pada kuesioner penelitian. Adapun tanggapan masyarakat mengenai implementasi kebijakan ETLE di Kota Serang dilihat melalui sub indikator ini menyatakan bahwa dengan adanya e-tilang, penegakan hukum berlalu lintas di Kota Serang dapat lebih efektif karena mengurangi pelanggaran lalu lintas, mengurangi konflik antara pihak kepolisian dengan pengendara bermotor, dan tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas lebih baik.

d. Letak Pengambilan Keputusan

Letak pengambilan keputusan memegang peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan. Pengambilan keputusan harus memperhatikan berbagai aspek yang dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Hasil pengolahan data dalam penelitian pada sub indikator letak pengambilan keputusan terdapat empat pernyataan, dan memperoleh skor ideal sebesar $4 \times 4 \times 100 = 1.600$ (Keterangan: 4 = jumlah skala likert tertinggi, 4 = jumlah pernyataan, 100 = jumlah responden). Adapun hasil dari penelitian pada sub indikator ini mendapatkan hasil sebesar $1.207 : 1.600 = 0.7543 \times 100\% = 75\%$. Implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kota Serang pada sub indikator letak pengambilan keputusan sudah berjalan dengan baik berdasarkan kriteria hasil persentase yang ditetapkan.

Peneliti menyertakan pernyataan terbuka yang terlampir pada kuesioner penelitian. Adapun tanggapan masyarakat mengenai implementasi kebijakan ETLE di Kota Serang dilihat melalui sub indikator ini menyatakan bahwa penerapan ETLE di Kota Serang sudah tepat karena melihat jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi, apalagi Kota Serang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Banten dan akses menuju Pelabuhan Merak. Menurut masyarakat, pengawasan terhadap penerapan kebijakan ETLE perlu ditingkatkan, terutama pada pengguna kendaraan yang menggunakan plat nomor palsu.

e. Pelaksana Program

Dalam menjalankan sebuah kebijakan tentu terdapat pihak-pihak yang menjalankan program dari sebuah kebijakan tersebut, apabila pihak-pihak pelaksana sebuah program sudah ditetapkan dengan jelas, maka sebuah kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik.

Hasil pengolahan data dalam penelitian pada sub indikator pelaksana program terdapat tiga pernyataan dan memperoleh skor ideal sebesar $4 \times 3 \times 100 = 1.200$ (Keterangan: 4 = jumlah skala likert tertinggi, 3 = jumlah pernyataan, 100 = jumlah responden). Adapun hasil dari penelitian pada sub indikator ini mendapatkan hasil sebesar $884 : 1.200 = 0.7366 \times 100\% = 73\%$. Artinya, implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kota Serang pada sub indikator pelaksana program sudah berjalan dengan baik berdasarkan kriteria hasil persentase yang ditetapkan.

Peneliti menyertakan pernyataan terbuka yang terlampir pada kuesioner penelitian. Adapun tanggapan masyarakat mengenai implementasi kebijakan ETLE di Kota Serang dilihat melalui sub indikator ini menyatakan bahwa masih saja ditemukan pengendara yang melanggar lalu lintas, contohnya seperti penggunaan plat nomor palsu. Selain itu, masyarakat tidak mengetahui apakah pengendara yang terkena tilang elektronik benar-benar memayarnya atau tidak sehingga perlu ada alternatif lain untuk pelanggaran lalu lintas yang enggan membayar kewajibannya.

f. Sumber-Sumber Daya yang Digunakan.

Peran sumber daya dalam pelaksanaan sebuah program kebijakan memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaannya. Kebijakan dapat berjalan baik apabila sumber daya seperti sarana prasarana, anggaran, sumber daya manusia dan lainnya dapat terpenuhi. Hasil pengolahan data dalam penelitian dengan sub indikator sumber-sumber daya yang digunakan terdapat empat pernyataan dan memperoleh skor ideal sebesar $4 \times 4 \times 100 = 1.600$ (Keterangan: 4 = jumlah skala likert tertinggi, 4 = jumlah pernyataan, 100 = jumlah sampel/responden). Adapun hasil dari penelitian pada indikator ini mendapatkan hasil sebesar $1.060 : 1.600 = 0.6625 \times 100\% = 66\%$. Artinya, implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kota Serang pada sub indikator sumber-sumber daya yang digunakan sudah berjalan baik berdasarkan kriteria hasil persentase yang ditetapkan.

Peneliti menyertakan pernyataan terbuka yang terlampir pada kuesioner penelitian. Adapun tanggapan masyarakat mengenai implementasi kebijakan ETLE di Kota Serang dilihat melalui sub indikator ini menyatakan bahwa walaupun penerapan e-tilang di Kota Serang ini sudah cukup lama, tetapi baru tersebar di enam titik saja sehingga perlu ditambah. Masyarakat menyarankan pihak kepolisian untuk mengawasi penerapan e-tilang tersebut pada saat jam operasional agar pengendara tetap taat berkendara sesuai dengan aturan walaupun sudah ada kamera e-tilang.

2. Lingkungan Kebijakan (Content of Implementation)

Hasil pengolahan data pada indikator *content of implementation* yang digunakan terdapat empat belas pernyataan, dan memperoleh skor ideal sebesar $4 \times 14 \times 100 = 5.600$ (Keterangan: 4 = jumlah skala likert tertinggi, 14 = jumlah pernyataan, 100 = jumlah responden). Adapun hasil dari penelitian mendapatkan hasil sebesar $4.193 : 5.600 = 0.7487 \times 100\% = 74\%$. Artinya, implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kota Serang pada indikator *content of implementation* yang digunakan sudah berjalan dengan baik berdasarkan kriteria hasil persentase yang ditetapkan.

a. Kekuasaan

Kekuasaan akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan yang diinginkan. Implementor dalam hal ini akan menjadi pihak yang paling berpotensi mempengaruhi sebuah proses implementasi. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat cukup jelas terlihat melalui rangkaian kegiatan yang terjadi di lapangan, meskipun belum dapat digambarkan secara keseluruhan, tetapi masing-masing pihak menunjukkan kepentingannya melalui tindakan yang dilakukan oleh masing-masing aktor kepentingan.

Hasil pengolahan data dalam penelitian dengan sub indikator kekuasaan terdapat empat pernyataan dan memperoleh skor ideal sebesar $4 \times 4 \times 100 = 1.600$ (Keterangan: 4 = jumlah skala likert tertinggi, 4 = jumlah pernyataan, 100 = jumlah responden). Adapun hasil dari penelitian pada sub indikator ini mendapatkan hasil sebesar $1.219 : 1.600 = 0.7618 \times 100\% = 76\%$. Artinya, implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kota Serang pada sub indikator kekuasaan sudah berjalan dengan sangat baik berdasarkan kriteria hasil persentase yang ditetapkan.

Peneliti menyertakan pernyataan terbuka yang terlampir pada angket penelitian. Adapun tanggapan masyarakat mengenai implementasi kebijakan ETLE di Kota Serang dilihat melalui sub indikator ini menyatakan bahwa pihak pelaksana program belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait. Walaupun penerapan tilang elektronik ini sangat memudahkan pelaksana program dalam mendeteksi pelanggaran, bukti-bukti juga sangat akurat, pemberian tilang melalui surat, namun terdapat kekurangan dalam penyampaian informasi melalui sosialisasi, baik itu secara langsung ataupun mengikuti perkembangan jaman melalui media sosial atau internet lainnya.

b. Karakteristik Rezim yang Berkuasa

Karakteristik rezim menjelaskan tentang bagaimana karakteristik pelaksana kebijakan itu dapat menangani permasalahan yang terjadi di masyarakat. Karakteristik ini tercermin dari adanya kewenangan dan tupoksi dari masing-masing lembaga yang berkuasa. Hasil pengolahan data dalam penelitian dengan sub indikator karakteristik rezim yang berkuasa terdapat empat pernyataan dan memperoleh skor ideal sebesar $4 \times 4 \times 100 = 1.600$ (Keterangan: 4 = jumlah skala likert tertinggi, 4 = jumlah pernyataan, 100 = jumlah responden). Adapun hasil dari penelitian pada sub indikator ini mendapatkan hasil sebesar $1.163 : 1.600 = 0.7268 \times 100\% = 72\%$. Artinya, implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kota Serang pada sub indikator karakteristik rezim yang berkuasa sudah berjalan dengan baik berdasarkan kriteria hasil persentase yang ditetapkan.

Peneliti menyertakan pernyataan terbuka yang terlampir pada kuesioner penelitian. Adapun tanggapan masyarakat mengenai implementasi kebijakan ETLE di Kota Serang dilihat melalui sub indikator ini menyatakan bahwa kebijakan ETLE ini harus menjamin setiap orang ditindak jika melakukan pelanggaran, tidak terkecuali para pemangku kepentingan.

c. Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon Dari Pelaksana

Implementor harus mempunyai daya tanggap dan konsisten dalam menjalankan sebuah kebijakan untuk mencapai target-target yang sudah ditentukan, fenomena ini membuktikan bahwa implementasi kebijakan pada pelaksanaannya tidak sesuai antara harapan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, hal ini yang membuat pemerintah untuk selalu memperhatikan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Hasil pengolahan data dalam penelitian pada sub indikator tingkat kepatuhan terdapat enam pernyataan dan memperoleh skor ideal sebesar $4 \times 6 \times 100 = 2.400$ (Keterangan: 4 = jumlah skala likert tertinggi, 6 = jumlah pernyataan, 100 = jumlah responden). Adapun hasil dari penelitian pada sub indikator ini mendapatkan hasil sebesar $1.811 : 2.400 = 0.7545 \times 100\% = 75\%$. Artinya, implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kota Serang pada sub indikator tingkat kepatuhan sudah berjalan dengan baik berdasarkan kriteria hasil persentase yang ditetapkan.

Peneliti menyertakan pernyataan terbuka yang terlampir pada angket penelitian. Adapun tanggapan masyarakat mengenai implementasi kebijakan ETLE di Kota Serang dilihat melalui sub indikator ini menyatakan bahwa penerapan e-tilang ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

Tabel 4
Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*
di Kota Serang Berdasarkan Model Implementasi Grindle

| Indikator | Hasil | Sub Indikator | Hasil |
|--|-------|--|-------|
| Isi Kebijakan (<i>Content of Policy</i>) | 75% | Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi | 75% |
| | | Tipe manfaat | 79% |
| | | Derajat perubahan yang ingin dicapai | 80% |
| | | Letak pengambilan keputusan | 75% |
| | | Pelaksanaan program | 73% |
| | | Sumber-sumber daya yang digunakan | 66% |
| Lingkungan Kebijakan (<i>Content of Implementation</i>) | 74% | Kekuasaan | 76% |
| | | Karakteristik rezim yang berkuasa | 72% |
| | | Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana | 75% |

Sumber: Peneliti, 2024.

Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa sub indikator derajat perubahan yang ingin dicapai memperoleh skor tertinggi sebesar 80%, artinya implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kota Serang dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat, salah satunya dalam mengurangi kemacetan lalu lintas. Sedangkan, sub indikator sumber-sumber daya yang digunakan memperoleh skor terendah sebesar 66%. Hal ini dikarenakan masih minimnya titik persebaran e-tilang di Kota Serang, yaitu hanya terdapat di enam titik saja.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kota Serang, dengan membagi skor hasil penelitian dengan skor ideal sebagai berikut:

Skor ideal = nilai skala Likert tertinggi x jumlah pernyataan x jumlah responden

Skor ideal = $4 \times 36 \times 100 = 14.400$

Skor hasil penelitian berdasarkan hasil kuesioner = 10.895

Tingkat keberhasilan implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kota Serang, yaitu:

(Skor hasil penelitian : skor ideal) x 100% = $(10.895 : 14.400) \times 100\%$

= $0,75659722 \times 100\%$

= 76% (sangat baik)

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa tingkat implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kota Serang sebesar 76%, artinya sudah berjalan dengan sangat baik. Pada indikator *content of policy* sudah berjalan dengan baik berdasarkan kriteria hasil persentase yang ditetapkan sebesar 75%. Pada indikator *content of implementation* yang digunakan sudah berjalan dengan baik berdasarkan kriteria hasil persentase yang ditetapkan sebesar 74%.

Peneliti memberikan rekomendasi agar kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kota Serang dapat berjalan semakin baik, yaitu: (1) Penambahan sebaran titik kamera e-tilang pada setiap lampu merah di Kota Serang, (2) Peningkatan pengawasan, dan (3) Peningkatan sosialisasi kebijakan secara masif dan konsisten.

REFERENSI

Buku:

Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Creswell, John W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Artikel Jurnal:

Faturrohman. G. M., Noor Mirra. (2021). *Peran Keadilan Prosedural dan Identitas Sosial Dalam Meningkatkan Efektivitas Penerapan E-Tilang di Jakarta (Analisis Kebijakan)*. Journal of Education, Humaniora, and Social Sciences (JEHSS), Vol. 4. No. 2. Hal: 677-685.

Maulana, M., Indri Astuti. (2022). *Penerapan Implementasi E-tilang di Kota Surabaya (Studi Kejaksaan Negeri Surabaya)*. Jurnal Inovasi Sektor Publik. Vol. 2(3): 97-110.

Peraturan Perundang-Undangan:

Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta.

Sumber Lainnya:

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Serang. (12 Juli 2024). *Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kecamatan dan Jenis Kendaraan di Kota Serang (Unit) Tahun 2023*. URL: <https://serangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzExIzI=/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-kecamatan-dan-jenis-kendaraan-di-kota-serang.html>. Diakses 10 September 2024.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten. (07 Februari 2024). *Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Banten (unit) Tahun 2022*. URL: <https://banten.bps.go.id/id/statistics-table/3/Vjj3NGRGa3dkRk5MTIU1bVNFOTVVbmQyVURSTVFUMDkjMw==/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kendaraan-di-provinsi-banten--unit---2022.html>. Diakses 10 September 2024.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten. (23 April 2024). *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Banten (Ribuan Jiwa), 2023-2024*. URL: <https://banten.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTIxIzI=/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin-di-provinsi-banten.html>. Diakses 08 September 2024.

GoodStats. (22 Mei 2024). *2023 Capai Angka Tertinggi Kecelakaan Lalu Lintas 5 Tahun Terakhir*. URL: <https://goodstats.id/article/2023-capai-angka-tertinggi-kecelakaan-lalu-lintas-5-tahun-terakhir-z67bk#:~:text=Pada%20tahun%202023%2C%20sebanyak%20140.629,diantaranya%20terjadi%20karena%20kesalahan%20manusia>. Diakses 30 Mei 2024.